



**P E N G U M U M A N**  
**KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**  
**PT BANK BTPN SYARIAH Tbk**

Merujuk pada (Pasal 10 ayat 2) Anggaran Dasar PT Bank BTPN Syariah Tbk ("Perseroan") tentang Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") dan (Pasal 14) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK-15/2020"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan POJK-15/2020, dengan ini disampaikan bahwa:

1. Pemanggilan Rapat yang memuat mata acara akan dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021;
2. Pemegang Saham yang berhak untuk hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang tercatat pada sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham di KSEI pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021 pukul 16:00 WIB;
3. Setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam (Pasal 10 ayat 11) Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan (Pasal 16) POJK-15/2020 dan telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat;
4. Perseroan sangat menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* yang disediakan oleh KSEI (eASY.KSEI), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu hari Selasa, tanggal 20 April 2021.

**Terkait dengan arahan Pemerintah Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencegahan penyebaran virus Covid-19, Perseroan akan mengumumkan secara terpisah tata cara penyelenggaraan Rapat, perhitungan kuorum dan pengambilan keputusan, dengan memperhatikan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.**

Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada situs web Perseroan ([www.btpnsyariah.com](http://www.btpnsyariah.com)), situs web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), dan situs web KSEI ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)).

Jakarta, 12 Maret 2021  
**PT Bank BTPN Syariah Tbk**  
Direksi



PT Bank BTPN Syariah Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

■ PELUNCURAN LOGO BARU BANK KB BUKOPIN



**President Director** PT Bank KB Bukopin Tbk. Rivan A. Purwantono (*kiri*) berbincang dengan Chief Strategic Officer Ji Kyu Jang saat peluncuran logo dan nama baru Bank KB Bukopin di Jakarta, Rabu (3/10).

Perseroan yakin dengan langkah transformasi yang dijalani dapat mewujudkan visi menjadi Top 10 bank di Indonesia dan menjadi pemain digital utama bagi bisnis retail dan segmen UMKM.

| KERJA SAMA LAYANAN KEUANGAN |

## Crowdo Jalin Kemitraan dengan Bank Neo

Bisnis, JAKARTA — PT Mediator Komunitas Indonesia pengembang platform layanan keuangan berbasis teknologi, Crowdo, menjalin kerja sama dengan PT Bank Neo Commerce Tbk. untuk penyaluran kredit modal kerja untuk pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Chief Operations Officer (COO) Crowdo Indonesia Nur Vitriani mengatakan bahwa kerja sama antara Bank Neo dengan Crowdo sebagai perusahaan *financial technology (fintech)* dengan teknologi dan layanan neobank, merupakan yang pertama di Indonesia. Nur menjelaskan Bank Neo Commerce (BNC) akan berkontribusi dalam kemitraan ini dengan penyediaan likuiditas kredit untuk membiayai pinjaman UMKM yang bergabung dengan ekosistem Crowdo. Sebagai bagian dari kemitraan,

akan mendapatkan keuntungan dari teknologi dan layanan Crowdo, seperti mesin penilaian kredit yang didukung *artificial intelligence (AI)*, proses *underwriting* yang sepenuhnya digital, dan *channel* akuisisi. “Kolaborasi ini adalah bukti inovasi dari Crowdo Neobank kepada UKM dan mitra institusi. Bank digital dan mitra pendana tidak perlu membangun bisnis dan teknologi UKM mereka dari awal dan dapat memanfaatkan Crowdo Neobank untuk dampak bisnis yang langsung dapat dinikmati sejak hari pertama,” ujarnya, Rabu (10/3). Sementara itu, Bank Neo Commerce (BBYB) memproyeksikan dapat menggenjot kredit dengan target pertumbuhan hingga 8% pada tahun ini. Akhir tahun lalu, jumlah kredit yang telah dikururkan oleh bank tercatat sebesar

Rp3,66 triliun, turun 4,27%. Adapun, pada tahun ini kredit diproyeksikan dapat mencapai Rp3,97 triliun. Hal tersebut disampaikan manajemen Bank Neo Commerce dalam laporan tahunan 2020. Adapun dana pihak ketiga diproyeksikan menjadi Rp3,72 triliun. Pendapatan bunga bersih diproyeksikan mencapai Rp298,32 miliar, atau naik 88,54% dibandingkan dengan posisi 2020 senilai Rp158,23 miliar. Selanjutnya laba tahun berjalan sebelum pajak diproyeksikan tumbuh 134,19%, dari Rp15,83 miliar menjadi Rp37,06 miliar. Direktur Utama Bank Neo Commerce Tjandra Gunawan menyampaikan Bank Neo akan melanjutkan transformasi bisnis dan transformasi digital yang sudah mulai dijalankan sejak 2019. (*Aziz Rahardyan/Azizah Nur Alfi*)

| PERFORMA BPJS KESEHATAN |

# PERKUAT FASILITAS LAYANAN PRIMER

Bisnis, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan perlu memperkuat layanan kualitas layanan di tingkat pertama. Selain itu, manfaat program juga perlu ditata ulang guna menghindari risiko beban layanan kesehatan yang melebihi penerimaan iuran.

Wibi P. Pratama  
redaksi@bisnis.com

**G**uru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Budi Hidayat mengatakan bahwa BPJS Kesehatan harus mampu melakukan optimalisasi pelayanan di tingkat pelayanan pertama atau primer karena akan memengaruhi beban pengeluaran jaminan sosial.

Dia mencatat bahwa hanya 18% biaya program jaminan kesehatan nasional (JKN) untuk pembiayaan di FKTP. Padahal, berdasarkan kalkulasinya, pembiayaan itu harus mencakup hingga 30%—40% dari total pembiayaan JKN.

“Saat ini juga perlu adanya evaluasi pada *benefit* atau manfaat di pelayanan kesehatan tingkat pertama. Dilanjutkan melakukan *costing* dan *pricing* tarif layanan kesehatan sebagai input dalam perhitungan kapitasi, serta upaya perluasan Kapitasi Berbasis Kinerja [KBBK],” ujarnya, Rabu (10/3).

Menurut Budi, kuatnya pembiayaan di sektor pelayanan primer dan meningkatkan keuntungan manfaat pelayanan kesehatan lainnya di FKTP akan memengaruhi biaya layanan di tingkat rujukan atau lanjutan. Program promotif dan preventif pun menjadi kunci di tahap ini.

Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Julita Hendrartini menilai bahwa penguatan layanan FKTP membuat penanganan penyakit kronis dan paliatif dapat dilakukan segera, melalui pelayanan telekonsultasi.

Upaya itu dapat mencegah kondisi pasien yang memburuk, sehingga menekan biaya layanan kesehatan.

Meningkatnya layanan di tingkat primer akan menekan beban fasilitas kesehatan tingkat lanjut, yang selama ini memakan biaya besar.

**TINJAU MANFAAT**

Keberhasilan BPJS Kesehatan mencetak surplus pada tahun lalu harus benar-benar dimanfaatkan untuk menata ulang dan meninjau manfaat program layanan kepada masyarakat agar biaya pelayanan kesehatan menjadi lebih efektif.

Ketua Umum Perkumpulan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi

Kesehatan Indonesia (Pamjaki) Rosa Christiana Ginting mengatakan bahwa efektivitas biaya pelayanan menjadi tantangan dalam upaya peningkatan kualitas layanan JKN. Biaya pelayanan itu berkaitan dengan paket manfaat yang ada dalam program JKN.

Dia menilai bahwa BPJS Kesehatan dan para pemangku kepentingan harus segera menyusun ulang manfaat layanan JKN dan alternatif pola pembayaran pada fasilitas kesehatan. Seperti diketahui, kebijakan manfaat layanan ditentukan oleh Kementerian Kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya.

“Kami mengapresiasi rencana akan disusunnya kebutuhan dasar kesehatan [KDK] dan kelas standar JKN yang akan segera diimplementasikan. Dengan demikian akan memudahkan dalam kebutuhan medis tambahan atau penunjang dari masyarakat kita yang bervariasi,” kata Rosa.

Menurutnya, implementasi KDK dan kelas standar JKN dapat memuluskan implementasi koordinasi manfaat, khususnya dengan asuransi kesehatan tambahan. Peluang terhadap *top up benefit* akan mengakomodasi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang memiliki kemampuan lebih untuk menanggung biaya sendiri.

“Skema jaminan kesehatan yang bersifat *public private mix* ini juga diharapkan dapat menekan biaya pelayanan kesehatan Program JKN, dengan koordinasi manfaat yang baik antar asuransi kesehatan tambahan maupun penjamin layanan publik lainnya,” ujar Rosa.

Konsultan Pembiayaan Kesehatan Taufik Hidayat turut menyampaikan hal serupa, yakni perlu terdapat alternatif pola pembayaran ke fasilitas kesehatan yang mengedepankan *outcome* dari layanan kesehatan bagi peserta. Pola baru itu khususnya perlu dilakukan dalam upaya promotif dan preventif.

Adapun, mantan Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2014—2021 Fachmi Idris menilai bahwa terdapat dua faktor yang dapat memperkuat program JKN. Pertama yakni faktor situasional yang mencakup dinamika dalam regulasi dan sinkronisasi, serta koordinasi dan sosialisasi, lalu faktor kedua terkait kelembagaan.

Menurutnya, regulasi harus terorganisasi dengan suasana yang baik. Sinkronisasi, koordinasi, dan sosialisasi membutuhkan sinergi antara jajaran direksi dan dewan pengawas yang mewakili

## PESERTA BPJS KESEHATAN

### Fokus Pelaksanaan Program JKN-KIS

Meningkatkan kualitas layanan di *customer journey* dengan fokus mengurangi antrean dengan inovasi sistem manajemen informasi *online* dan inovasi *face recognition* dengan teknologi kecerdasan buatan atau *artificial intelligence*.

*Engagement* atau keterlibatan masyarakat dan *stake holder* dalam mendukung dan mempunyai *sense of belonging* dengan Program “BPJS Mendengar”.

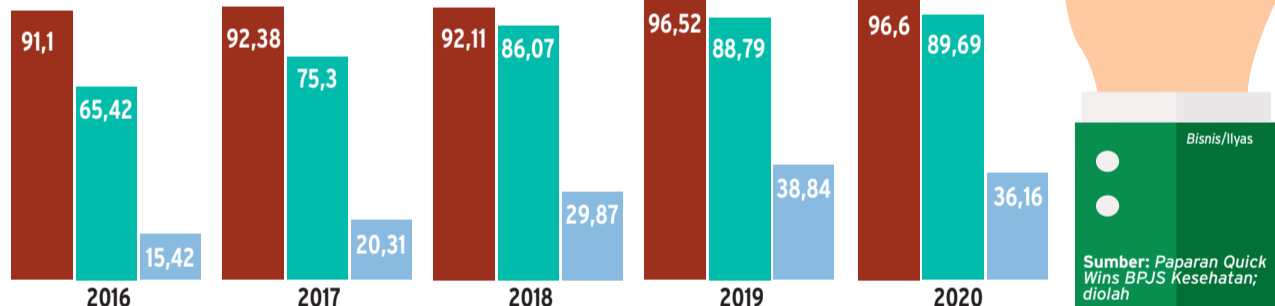
Memperluas cakupan kepesertaan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan alternative inovasi pendanaan Program JKN.

Menjaga sustainability program JKN-KIS.

■ Penerima Bantuan Iuran  
■ Non Penerima Bantuan Iuran  
■ Pemerintah Daerah

Hingga akhir Desember 2020, peserta yang tercatat di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencapai 222,46 juta.

### Jenis Peserta Jaminan Kesehatan-Kartu Indonesia Sehat



unsur-unsur lembaga terkait.

“Selain itu faktor kelembagaan BPJS Kesehatan adalah kunci penting dimana lembaga ini harus terus menguatkan kapasitas dan kapabilitas serta kredibilitas SDM BPJS Kesehatan,” ujar Fachmi dalam kesempatan yang sama.

Dia juga menekankan adanya pekerjaan rumah yang besar terkait Universal Health Coverage (UHC). Penerapan sanksi pelayanan publik pun masih belum dapat terimplementasi, sehingga perlu

koordinasi antarlembaga yang kuat untuk merealisikannya.

“Dengan hal tersebut diharapkan UHC akan segera terwujud, seluruh warga negara terlindungi program JKN, dan keberlangsungan program JKN akan terwujud,” ujar Fachmi.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufon Mukti mengapresiasi kontribusi para pakar dan tokoh jaminan sosial ini dalam memberikan gagasan, ma-

sukan serta evaluasi yang telah disampaikan.

“Kami harapkan komunikasi ini akan tetap terjalin dan terus berkesinambungan, gagasan dan evaluasi yang berharga ini akan kami telaah dan analisa lebih dalam sebagai upaya perbaikan Program JKN-KIS ke depan,” katanya.

**PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT BANK BTPN SYARIAH Tbk**

Merujuk pada (Pasal 10 ayat 2) Anggaran Dasar PT Bank BTPN Syariah Tbk (“Perseroan”) tentang Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) dan (Pasal 14) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK-15/2020”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan POJK-15/2020, dengan ini disampaikan bahwa:

- Pemanggilan Rapat yang memuat mata acara akan dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021;
- Pemegang Saham yang berhak untuk hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang tercatat pada sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham di KSEI pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021 pukul 16:00 WIB;
- Setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam (Pasal 10 ayat 11) Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan (Pasal 16) POJK-15/2020 dan telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat;
- Perseroan sangat menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* yang disediakan oleh KSEI (eASY.KSEI), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu hari Selasa, tanggal 20 April 2021.

Terkait dengan arahan Pemerintah Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencegahan penyebaran virus Covid-19, Perseroan akan mengumumkan secara terpisah tata cara penyelenggaraan Rapat, perhitungan kuorum dan pengambilan keputusan, dengan memperhatikan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada situs web Perseroan ([www.btpnsyariah.com](http://www.btpnsyariah.com)), situs web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), dan situs web KSEI ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)).

Jakarta, 12 Maret 2021  
PT Bank BTPN Syariah Tbk  
Direksi

**PENGUMUMAN RELOKASI KANTOR CABANG PEMBANTU**

Berdasarkan surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan No. S-44/PB.121/2021 tanggal 8 Maret 2021 dengan ini diumumkan kepada nasabah BCA Kantor Cabang Pembantu Alaydrus khususnya dan nasabah BCA umumnya serta masyarakat luas, bahwa :

**BCA KCP Alaydrus**

Jl. Alaydrus No.48B  
Jakarta Pusat 10130

**per tanggal 29 Maret 2021 pindah alamat ke :**

Jl. Alaydrus No.47 & 47A  
Jakarta Pusat 10130

Demikian pengumuman ini kami sampaikan agar menjadi perhatian.

Jakarta, 12 Maret 2021  
PT Bank Central Asia Tbk

“ Saat ini juga perlu adanya evaluasi pada *benefit* atau manfaat di pelayanan kesehatan tingkat pertama.